

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Zainal., *Psikologi Korupsi: Memahami Aspek-Aspek Psikologis Pelaku Korupsi, Pola-Pola Perilaku Korupsi, dan Pola-Pola Penanganan Korupsi di Indonesia*, (PT Remaja Rosdakarya, 2015).
- Blad, R. John., *Criminal Justice System as a Social Problems: an Abolitionist Perspective*, (Erasmus Universiteit Rotterdam, 1987).
- Chandra, Tofik Yanuar., *KPK dan Kewenangan Penetapan Status Justice Collaborator*, (PT Sangir Multi Usaha, 2022).
- Djaja, Ermansjah., *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Farid, Andi Zainal Abidin., *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Hamzah, Andi., *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Hartanti, Evi., *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Hatta, Muhammad., *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, (Aceh: Unimal Press, 2019).
- Jugiyanto., *Sistem Teknologi Informasi, Pendekatan Terintegrasi: Konsep Dasar, Teknologi, Aplikasi Pengembangan dan Pengelolaan*, (Yogyakarta: Andi, 2022).
- Junaidi, Muhammad., *Teori Perancangan Hukum*, (Semarang: Universitas Semarang Press, 2021).
- Kenedi, John., *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017).
- Lamintang, P. A.F. dan Theo Lamintang., *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Muladi., *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- Mulder, A., *Strafrechtspolitik, Delikt en Delinkwent*, (1980).

- Mulyadi, Lilik., *Perlindungan Hukum Whistle Blower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Bandung: PT Alumni, 2015).
- Nawawi Arief, Barda., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Kencana, 2008).
- Nawawi Arief, Barda., *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Ananta, 1994).
- Nawawi Arief, Barda., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Ohlin, Lloyd E. and Frank J. Remington., *Discretion in Criminal Justice: The Tension Between Individualization and Uniformity*, (Albany: State University of New York Press, 1993).
- Peak, Kenet J., *Justice Administration, Police, Courts, and Corrections Management*, (New Jersey: Department of Criminal Justice, 1995).
- Rahardjo, Satjipto., *Ilmu Hukum, Cetakan ke-9*, (Semarang, 2021).
- Reksodiputro, Mardjono., *Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum I, 2007).
- Shafira, Maya dkk., *Sistem Peradilan Pidana*. (Lampung: Pusaka Media, 2022).
- Sidharta, Bernard Arief., *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000)
- Soedarto., *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Soemitro, Ronny Hanitijo., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Suardita, I Ketut., *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, (Denpasar: Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017).
- Surachmin dan Suhandi Cahaya., *Strategi dan Teknik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Thontowi, Jawahir., *Budaya Hukum dan Kekerasan dalam Dinamika Politik Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).

JURNAL

- Bardi, Ahmad., “Kewenangan LPSK Dalam Penetapan Justice Collaborator Dalam Kasus Tindak Pidana Umum di Indonesia (Studi Putusan No.798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL)”, *UnizarLawReview*, Vol. 6, Issue 1, Juni 2023.
- Derek, Briant., “Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator Menurut Hukum Pidana di Indonesia.” *Lex et Societatis*, vol. 5, no. 5, Jul. 2017.
- Detik News., “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024 Jadi 37, Peringkat 99”, <https://news.detik.com/berita/d-7773057/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2024-naik-jadi-37-peringkat-99>, diakses pada 16 Maret 2025.
- Fitriati, “Analisis Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Perspektif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Yustisia* Edisi 90 September – Desember 2014.
- ICW dan PSHK, “Laporan Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2019-2024”, *Indonesia Corruption Watch*, September 2024.
- Jardan, Gerry dan Khairani., “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Justice Collaborator di Indonesia”, *Jurnal Swara Justisia*, Vol. 8, No. 1, April. 2024.
- Muhammad, I Rusli., “Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 2 Vol. 22, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, April 2015.
- Muhammad, Rusli., “Pengaturan dan Urgensi Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* vol. 22, no. 2, 2015.
- Oktafia, Dwi dan Nita Ariyani., “Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 2, Mei. 2020. DOI : <https://10.20885/iustum.vol27.iss2.art6>
- Pusat Edukasi Antikorupsi, “Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK untuk Visi Indonesia Bebas dari Korupsi”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220511-trisula-strategi-pemberantasan-korupsi-kpk-untuk-visi-indonesia-bebas-dari-korupsi>, diakses pada 16 Maret 2025.
- Safira, Martha Ari., “Law is a Tool of Social Engineering dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Kodifikasi*, Vol. 11, No. 1, 2017.
- Thalib, H., S. Rahman, and A. H. Semendawai, "THE ROLE OF JUSTICE COLLABORATOR IN UNCOVERING CRIMINAL CASES IN

INDONESIA," *Diponegoro Law Review*, vol. 2, no. 1, pp. 27-39, Apr. 2017.
<https://doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.27-39>

DISERTASI, TESIS, SKRIPSI

Avianti, Fransiska., (2008, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro) *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia.*

Gultom, Laura., (2018, Skripsi, Universitas Lampung), *Studi Komparatif Antara Justice Collaborator dengan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi.*

Simanjuntak, Gabriel., (2022, Skripsi, Universitas Tidar), *Formulasi Pedoman Pemidanaan sebagai Pengurangan Hukuman Terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 430/K/Pid.Sus/2018).*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)